

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, yaitu dengan cara berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Pola Interaksi merupakan suatu cara, model, dan bentuk interaksi yang saling memberikan pengaruh dan mempengaruhi dengan adanya timbal balik guna mencapai tujuan. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada sebuah kehidupan. Dalam proses interaksi ada proses asosiatif yang berjalan tanpa adanya konflik dan kekerasan yang terjadi pada masyarakat. Tetapi dalam sebuah dinamika kehidupan yang multikultural ini pasti akan ada proses sosial disosiatif, yang berinteraksi dengan cara menentang, sehingga dapat menghasilkan suatu konflik. Ada beberapa jenis konflik, yang pertama ada konflik Gender, lalu ada konflik rasial antar suku, konflik antar umat beragama, konflik antar golongan, konflik kepentingan, konflik antar pribadi, konflik antar kelas sosial, dan konflik antar negara.

Indonesia merupakan negara yang multikultural banyak masyarakatnya berbeda dalam beberapa aspek, dari mulai suku, bahasa, dan ras. Tidak lepas dari itu ada sebuah provinsi yang ke 27 yang terintegrasi dengan Indonesia pada 17 Juli tahun 1976 yaitu provinsi Timor Timur, Timor Timur merupakan wilayah jajahan Portugis sejak awal abad ke-16. Revolusi Bunga yang terjadi di Portugis pada 25 April 1974 menyebabkan perubahan yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat Timor Timur, revolusi bunga merupakan sebuah kudeta yang dilakukan kepada pemerintahan Antoni De Alivera Sulazan yang merupakan diktator dan digantikan oleh Antonio De Spinola. Perpindahan kekuasaan tersebut membuat masyarakat Timor Timur membuat partai politik untuk mencapai kemerdekaan, Awal bulan Mei 1975 masyarakat Timor Timur mulai membentuk partai-partai politik, ada beberapa partai politik yang cukup berpengaruh pada saat itu menurut departemen Penerangan Provinsi Timor Timur (1981, hlm 22) partai politik ini terdiri dari

- 1) *UDT (Uniao Democratica Timorese)* partai ini mempunyai tujuan agar Timor Timur tetap menjadi negara dibawah portugal.

- 2) FRETILIN (*Frente Revolucionaria de Timor leste Independente*) yang awal mula berdirinya mempunyai nama ASDT (Asosiasi Sosial Demokratik Orang Timor) Dan menginginkan integrasi dengan Indonesia, tetapi berubah menjadi sebuah partai yang berhaluan komunis dan mengubah namanya menjadi FRETILIN partai ini menginginkan kemerdekaan atas Timor Timur dan menjadi negara merdeka.
- 3) APODETI (*Associacao Populler democratic Timorenses*) yang memperjuangkan agar Timor leste berintegrasi dengan Indonesia.

Dengan banyaknya partai yang berdiri dan ingin mencapai tujuan partainya, maka keadaan semakin tidak terkendali. FRETILIN merupakan partai garis keras yang mempunyai ideologi komunis tidak segan untuk menghabisi lawan yang bertentangan dengan partainya. Melihat pergerakan FRETILIN yang tetap ingin merdeka dari Portugis setelah lama menjadi negara jajahan selama 400 tahun, FRETILIN yang semakin gencar melakukan pembantaian terhadap warga sipil yang sebagian besar merupakan warga yang ingin berintegrasi dengan Indonesia dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada 28 November 1975. Dalam Suartika (2015, hlm. 98) menyebutkan bahwa "tokoh-tokoh UDT, KOTA dan Apodeti dan Trabalhista mengadakan pertemuan. Mereka berpendapat dan meyakini bahwa integrasi dengan Indonesia adalah jalan yang baik bagi masa depan Timor leste. Perundingan tersebut berhasil menemui sebuah kesepakatan, dan dibuatnya Deklarasi Balibo pada tanggal 30 November 1975" Inti dari deklarasi tersebut menyatakan kehendak Timor leste untuk integrasi dengan Republik Indonesia. Keadaan tidak membaik setelah deklarasi itu, perbedaan ideologi inilah yang membuat keadaan tidak kondusif perang saudara terjadi di Timor Timur dan saling menghancurkan satu sama lain. Pertentangan paham Pro dan Kontra semakin terlihat setelah Timor Timur dilegitimasi dalam undang-undang No 7 tahun 1976 tanggal 17 Juli. Dalam Undang-undang itu disebutkan penyatuan Timor Timur kedalam Republik Indonesia dan menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia.

Setelah berintegrasi dengan Indonesia, pemerintah pusat langsung melakukan pembangunan infrastruktur di daerah Timor Timur, pembangunan tersebut berupa jalan raya, sekolah, tempat ibadah dan eksplorasi sumber daya alam yang tersimpan di daerah tersebut. Suartika (2015, hlm. 147) mengatakan

Pembangunan sumber daya manusia juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia. pendidikan merupakan bidang yang sangat vital dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia mengirimkan 1500 guru SD, SMP dan SMA secara bertahap dari Pulau Jawa dan Sumatera serta membangun 115 sekolah SD, SMP dan SMA di Timor Timur. Penataran P4 merupakan program yang wajib untuk dipelajari para murid. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan di sekolah. Pemerintah memahami bahwa pendidikan yang memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa, sedangkan rakyat Timor Timur merupakan rakyat yang baru menjadi bagian dari Indonesia, sehingga pembentukan karakter rakyat Timor Timur menjadi rakyat Indonesia merupakan program pemerintah yang dimulai dari generasi muda, yaitu anak-anak yang masih bersekolah.

Perubahan sosial, politik dan ekonomi sangat terlihat jelas ketika Timor Timur menjadi provinsi ke 27 Republik Indonesia, dalam masalah sosial dan kepribadian pemerintah berusaha membentuk masyarakat Timor Timur menjadi warga Indonesia seutuhnya dengan melakukan penataran P4 (pedoman, penghayatan dan pengalaman pancasila) yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Timor Timur agar bisa mengetahui dasar-dasar negara serta nilai yang terkandung didalamnya, dan menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa sehari-hari. karena pemerintah menyadari bahwa Timor Timur merupakan daerah jajahan portugis selama 400 tahun yang berlatar belakang sangat berbeda dengan penduduk Indonesia pada umumnya. Struktur sosial ikut berubah, dalam masa penjajahan portugis status sosial yang paling tinggi adalah paus atau pendeta, namun setelah integrasi status sosial yang tertinggi adalah pejabat pemerintahan. Beberapa hal membuat warga Timor Timur kehilangan identitasnya seperti penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sehingga bahasa asli masyarakat Timor Timur yaitu bahasa Tetun tidak mendapat tempat dalam pergaulan masyarakat sehari-hari, serta doktrin pancasila yang dilakukan pemerintah membuat idiologi masyarakat berdasarkan agama yang telah dianut sekian lama tidak memiliki tempat di masyarakat. Indonesia mempunyai wewenang penuh atas pemerintahan yang ada di Timor Timur, perubahan struktur pemerintahan dan birokrasi terjadi di Timor Timur hal ini terbukti dengan digantinya nama-nama dalam pemerintahan peninggalan portugis seperti. *Concelho* diubah menjadi Kabupaten, *Postos administrativos* diubah menjadi Kecamatan, *Administradov* menjadi Bupati, *cheve de posto* menjadi Camat dan *Sucos* menjadi Desa. Selain itu birokrasi baru juga ditetapkan di Timor

Timor, yaitu pejabat pemerintahan berasal dari politisi. Hal ini jelas sangat jauh berbeda dengan masa sebelum integrasi dan zaman penjajahan portugis, dimana yang mempunyai kewenangan tertinggi adalah Paus atau pendeta, karena sebagian besar masyarakat lebih mempercayai perkataan seorang pemuka agama.

Dalam hal perekonomian setelah integrasi, Timor Timur secara bertahap mengalami perkembangan, karena banyak pedagang pendatang yang berasal dari Jawa dan Sumatera menetap di Timor Timur sehingga perekonomian semakin berkembang. Namun dalam hal ini masyarakat Timor Timur mempunyai rasa kecemburuan sosial, karena masyarakat pendatang lebih menguasai perdagangan sedangkan masyarakat Timor Timur sendiri hanya menjadi konsumen. Suartika (2015, hlm 150) mengatakan “Perekonomian di Timor Timur diklasifikasikan sebagai perekonomian dengan pendapatan menengah kebawah oleh Bank Dunia. Timor Timur berada di peringkat 158 dengan tingkat perkembangan manusia 20% penduduk menganggur dan 52,9% hidup dengan pendapatan US\$ 1,25 per hari”. Dalam hal pendidikan sangat jauh berbeda apa yang ada di kota dan di pedesaan, pendidikan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan juga pembangunan yang tidak merata di wilayah Timor Timur membuat Fretilin semakin gencar mempengaruhi masyarakat Timor Timur dengan ambisi lamanya, yaitu memerdekakan diri dari Indonesia. Semua itu membuat warga Timor Timur semakin terpengaruh, apalagi ada suatu tragedi yang terkenal yaitu tragedi Santa Cruz pada 12 November 1991 dimana masyarakat Timor Timur sedang melakukan acara pemakaman salah satu rakyat yang ditembak Tentara Indonesia karena ingin memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Dalam acara pemakaman itu mereka membawa spanduk yang bertuliskan untuk penentuan nasib sendiri atau medeka. Dalam prosesi pemakaman itu Tentara Indonesia mulai menembaki manusia yang ada dalam prosesi pemakaman tersebut, hampir 1000 orang menjadi korban. Mengingat kejadian ini semakin membuat masyarakat Timor Timur ingin memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara yang merdeka. Dalam usaha menyelesaikan masalah Timor Timur presiden B.J Habibie memberikan otonomi khusus pada provinsi ke 27 tersebut. Namun otonomi khusus tidak bisa membuat warga puas dan tidak bisa meredam konflik yang terjadi di Timor Timur, hal ini juga disebabkan oleh kejadian Santa Cruz yang

membuat masyarakat tidak percaya pada pemerintahan Indonesia. Hal ini membuat Fretilin semakin leluasa untuk membawa masa yang lebih banyak untuk mendukungnya, tidak hanya dengan mempengaruhi warga, tapi Fretilin juga meminta bantuan kepada negara tetangga terutama Australia, Australia merupakan negara pendukung integrasi dengan Indonesia tetapi dikarenakan Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan mengangkat isu hak asasi manusia Australia berbalik dengan mendukung keinginan Timor Timur untuk merdeka dari Indonesia dan mendapat perhatian di dunia internasional, khususnya Australia, Amerika, dan Uni Eropa. Dengan kejadian ini presiden B.J Habibie memberikan dua pilihan kepada Timor Timur yang pada awalnya hanya memberikan satu opsi yaitu otonomi khusus pada kesempatan ini presiden B.J Habibie memberikan tambahan opsi yaitu otonomi khusus atau berpisah dari Indonesia. Ketika kebijakan itu diumumkan masyarakat Indonesia sangat terkejut, karena telah Triliunan dana dikucurkan untuk membangun provinsi ke 27 tersebut, telah ribuan tentara Indonesia yang meninggal akibat operasi seroja yang dilakukan untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Pada 20 Mei 2002 Timor Timur resmi menjadi negara sendiri dan lepas dari Indonesia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste. Jauh sebelum memisahkan diri, masyarakat Timor Timur yang ingin tetap menjadi warga negara Indonesia banyak yang bermigrasi ke daerah-daerah di Indonesia. Sebelum memisahkan diri konflik yang terjadi antara pihak Indonesia dan Timor Timur berjalan panjang dan dipenuhi oleh pengaruh negara tetangga, seperti Australia yang mendukung kemerdekaan Timor Timur dibawah pimpinan penguasa Fretilin. Konflik tersebut merupakan konflik antar kepentingan. Realitas politik selalu diwarnai dengan dua kelompok yang saling berbeda kepentingan. Perbedaan kepentingan ini dipicu oleh gejala satu pihak ingin merebut kekuasaan dan kewenangan didalam masyarakat, dipihak lain terdapat kelompok yang berusaha mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan dan kewenangan yang sudah ada ditangan mereka.

Maka dari itu dalam jangka waktu tahun 1990-2002 banyak sekali warga Timor Timur yang memilih menjadi warga negara Indonesia dan menetap di berbagai wilayah Indonesia, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa,

termasuk datang ke wilayah Kabupaten Sumedang salah satunya di daerah Tanjungsari. Dalam kasus ini penduduk imigran Timor Timur datang ke daerah Tanjungsari Sumedang pada tahun 1999, sebelum secara resmi provinsi itu memisahkan diri dari Indonesia. Mereka bermigrasi karena mereka merasa tidak aman hidup di daerah konflik yang sudah lama terjadi antara tentara Indonesia dengan Fretilin, mereka mengaku lebih mencintai negara Indonesia dibandingkan tempat kelahirannya, mereka bahkan mengaku ingin hidup dan mati di negara kesatuan republik Indonesia. Lembaga Demografi UI (2010, hlm. 133) berpendapat bahwa “Migrasi merupakan perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau batas administrasi/batas suatu negara. Jadi migrasi merupakan perpindahan yang permanen dari suatu daerah daerah lain”. Awal pertama mereka datang ke Jawa Barat adalah datang ke daerah Kebon kopi , Cibereum, Kota Cimahi sebagai lokasi untuk mempererat kekeluargaan masyarakat Timor Timur, namun ada beberapa tokoh yang berinisiatif untuk membuat sebuah yayasan, lalu mulai saat itu mereka mulai menggarap lahan yang disediakan untuk dibuat sebuah gedung. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang didapat dari narasumber Bapak Y selaku ketua RW 14 Babakan mulya, mereka datang ke daerah Tanjungsari karena ditempatkan langsung oleh pemerintah dan disediakan tanah untuk mereka bangun menjadi tempat tinggal serta yayasan untuk menampung masyarakat korban konflik Timor Timur. diketahui pada tahun 2016 jumlah mereka sebanyak 96 orang yang didominasi oleh anak-anak. Namun jumlahnya bertambah pada tahun 2017 menjadi 167 orang.

Mereka beradaptasi dengan masyarakat sekitar tanpa ada konflik dan pertentangan walaupun terdapat perbedaan suku, ras, bahasa dan lain-lain. Bahkan mereka dapat berbaur dengan mudah dan mengikuti kegiatan –kegiatan yang dilakukan untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan suku dan ras bisa menimbulkan konflik, seperti kasus di daerah sampit kalimantan tengah antara suku Dayak dengan Madura seperti dikemukakan oleh Patji (2003, hlm. 14)

Orang Madura berhasil dalam kegiatan atau usaha ekonomi, tetapi bukan hal itu yang menjadi penyulut kerusuhan sosial Sampit 2001. Dikatakannya kalau sukses di bidang ekonomi orang Cina jauh melebihi

orang Madura, tetapi mengapa mereka tidak dipermasalahkan oleh orang-orang Dayak. Sebenarnya latar belakang kerusuhan Sampit 2001 yang kemudian meluas ke beberapa kota / kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah adalah benturan budaya bukan kecemburuan sosial. Warga Madura tidak mau mengerti budaya masyarakat Dayak. Mereka tidak menghayati dan mempraktekkan budaya "dimana langit dijunjung disitu bumi dipijak" – maksudnya tidak menghargai kebudayaan, adat istiadat masyarakat sekitar, yang dalam hal ini adalah kebudayaan masyarakat Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan Tengah.

Lalu ada konflik Lampung dengan masyarakat imigran bali, hal ini terjadi di daerah Lampung selatan, provinsi Lampung. Dikemukakan oleh Ariestha (2013, hlm. 150) Faktor penyebab utama terjadinya konflik antara Etnik Bali (Balinuraga) dengan Etnik Lampung (Agom) adalah:

- 1) Disebabkan oleh perilaku warga Desa Balinuraga dalam hidup bermasyarakat yang dianggap menyinggung perasaan dan tidak sesuai dengan adat istiadat etnik pribumi (Etnik Lampung).
- 2) Peristiwa yang dianggap memicu konflik antara etnik Bali (Balinuraga) dengan Etnik Lampung (Agom) adalah peristiwa kecelakaan sepeda motor yang melibatkan pemuda dari Etnik Bali (Balinuraga) dengan gadis dari Etnik Lampung (Desa Agom dan Desa Negeri Pandan) yang diwarnai dengan pelecehan seksual terhadap korban. Pelecehan seksual tersebut menimbulkan kemarahan pada Etnik Lampung.
- 3) Faktor yang memobilisasi massa sehingga terlibat dalam konflik, yaitu:
 - a. Dendam dari konflik-konflik sebelumnya yang melibatkan Etnik Balinuraga dengan desa-desa mayoritas Etnik Lampung dan sekitar Desa Balinuraga.
 - b. Masalah ekonomi, yaitu perasaan sakit hati dari Etnik Lampung, karena banyak tanah penduduk milik pribumi yang beralih tangan kepada warga Desa Balinuraga melalui jerat hutang.

Dalam konflik ada juga konflik di daerah Poso yang melibatkan banyak masyarakat yang terlibat didalamnya, dan memakan waktu yang sangat lama. hal ini dikarenakan adanya sebuah perasaan fanatik terhadap golongan tertentu dan permainan elite politik yang terlibat untuk memperebutkan kekuasaan. hal ini terdapat dalam Rendi (2014, hlm. 61) "Konflik Poso disebabkan adanya sebagian komunitas yang merasa kecewa karena merasa termanjinalkan dalam proses interaksi masyarakat, dan bergerak atas nama agama untuk memperbesar eskalasi yang terjadi".

Karena dalam setiap kelompok masyarakat pasti memiliki perasaan etnosentrisme yang cukup tinggi maka tidak sedikit terjadi konflik yang

melibatkan antara dua suku dan agama yang berbeda. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak suku dan agama didalamnya, hal ini sangat besar potensi untuk terjadinya sebuah konflik. Namun hal berbeda terjadi pada masyarakat imigran Timor Timur di Tanjungsari dari awal kedatangannya tidak pernah terjadi gesekan antara masyarakat imigran dengan masyarakat sekitar. Hal ini menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian dan mengetahui bagaimana proses adaptasi yang dilakukan kedua masyarakat agar mengurangi perbedaan yang bisa membuat konflik seperti kasus di atas. meskipun pada awal kedatangan imigran Timor Timur ke Tanjungsari, sebagian masyarakat sekitar sering mencibir karena adanya perbedaan etika dalam bertetangga seperti menyapa ketika melewati sekumpulan orang hingga kepada hal yang menjurus ke SARA. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, hal tersebut tidak menimbulkan masalah besar yang bisa mengakibatkan kepada peperangan antar suku sebagaimana yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia

Hal tersebut cukup membuktikan bahwa adanya proses adaptasi yang baik dari kedua warga masyarakat yang mempunyai latar belakang suku dan ras yang berbeda dan tinggal di satu tempat yang sama, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul skripsi

“POLA ADAPTASI IMIGRAN TIMOR TIMUR DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DI KECAMATAN TANJUNGSARI”

1.2 Rumusan Masalah

Agar penelitian dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis perlu merumuskan apa yang menjadi permasalahannya. Secara umum masalah yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pola adaptasi imigran Timor Timur dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan Tanjungsari, hingga tidak pernah terjadi konflik sosial. Untuk memerinci masalah di atas, maka penulis membuat beberapa sub masalah yang ditampilkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana proses adaptasi masyarakat imigran Timor Timur dengan masyarakat sekitar di Tanjungsari?
- 1.2.2 Faktor apa saja yang mengintegrasikan imigran Timor Timur dengan masyarakat Tanjungsari?

- 1.2.3 Bagaimana proses asimilasi dan akulturasi yang berlangsung antara penduduk imigran Timor Timur dengan masyarakat Tanjungsari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah

- 1.3.1 Untuk mendapatkan fakta dan data serta menggambarkan bagaimana berlangsungnya pola adaptasi antara masyarakat Sunda dengan masyarakat imigran Timor Timur di Tanjungsari.
- 1.3.2 Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengintegrasikan masyarakat Sunda dengan masyarakat eks Timor Timur dan strategi adaptasi kedua masyarakat.
- 1.3.3 Untuk mengetahui asimilasi dan akulturasi yang berlangsung antara imigran Timor Timur dengan masyarakat sekitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat teoritis: Diharapkan dapat menambah pengetahuan bersama dalam bidang ilmu sosiologi seperti pentingnya pengetahuan multikulturalisme ataupun kemajemukan yang dapat menguatkan perasaan cinta tanah air dalam masyarakat, selain itu penelitian ini diharapkan juga bermanfaat bagi ilmu pendidikan sosiologi, seperti dapat diterapkan dalam pembelajaran sosiologi mengenai pembelajaran tentang interaksi dan masyarakat multikultural.
- 1.4.2 Manfaat praktis: Penelitian tentang Pola adaptasi masyarakat imigran Timor Timur dalam kehidupan bermasyarakat di kecamatan Tanjungsari dapat memperkaya wawasan peneliti, khususnya dalam interaksi dan adaptasi di masyarakat. Lalu manfaat bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat akan pentingnya sikap toleransi dan saling menghargai antar warga masyarakat. Manfaat untuk Pemerintah, penelitian ini mendorong perbaikan kinerja pemerintah, untuk lebih memperhatikan kehidupan masyarakat pengungsi korban konflik,

dan memperhatikan masyarakat sekitar agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang bisa menyebabkan masalah baru.

- 1.4.3 Manfaat untuk masyarakat sekitar: penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan sosiologis masyarakat dan diharapkan masyarakat mampu mempertahankan kerukunan yang telah terjalin selama 18 tahun.
- 1.4.4 Manfaat untuk masyarakat Imigran: diharapkan dengan penelitian ini masyarakat imigran Timor timur mampu mempertahankan kerukunan dengan masyarakat sekitar, serta dapat menjunjung tinggi nilai dan norma sekitar, serta dapat memperluas wawasan mengenai sosiologi dan menambah wawasan bagi masyarakat imigran yang sedang menjalani pendidikan di perguruan tinggi.
- 1.4.5 Manfaat untuk pemerintah desa: diharapkan dapat menjaga kerukunan antara masyarakat setempat dan masyarakat imigran, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu lebih mengetahui kehidupan kedua masyarakat tersebut sehingga dapat mengantisipasi gesekan antara kedua masyarakat.
- 1.4.6 Untuk penelitian selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melihat apa yang belum terungkap dalam penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan kajian tentang masyarakat imigran timor timur di Tanjungsari.